

Menafsir Ulang Independensi Pers Dalam Perspektif Etika Media: Studi Literatur Atas Pemberitaan Politik Tempo

Lapina Lena¹, Achmad Nashrudin Priatna², Della Meira³, Siti Abelia Puteri⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Bangsa

¹baemina264@gmail.com, ²nashrudin.achmad@gmail.com, ³dellameiraa580@gmail.com,

⁴sabeliaputeri03@gmail.com

Corresponding author: baemina264@gmail.com

Submitted: 15/12/2025; Revised: 20/01/2026; Published: 21/01/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i1.442>

Abstract

Press independence is a fundamental principle in the practice of democratic journalism, particularly in political reporting, which is full of interests and power relations. However, in practice, press independence not only faces political pressure but is also influenced by the economic structure of the media and the dynamics of journalistic ethics. This article aims to reinterpret the concept of press independence within the framework of media ethics through a literature review of political reporting practices, focusing on Tempo as a representation of critical journalism in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature study method, analyzing various academic sources, press regulations, and previous studies relevant to press independence, media ethics, and political reporting. The study results show that press independence cannot be understood as an absolute condition free from influence, but rather as an ethical practice that is dynamic and contextual. Tempo showing a form of ethical independence through the courage to take a critical stance based on facts and public interest, even under the pressure of economic and political media structures. Thus, press independence in political reporting is more accurately understood as the result of ongoing negotiation between the normative principles of journalism, media ethics, and the structural realities of the press industry. This study is expected to enrich academic discourse on media ethics and press independence in Indonesia.

Keywords: *Press Independence, Media Ethics, Political Reporting, Critical Journalism, Tempo*

Abstrak

Independensi pers merupakan prinsip fundamental dalam praktik jurnalisme demokratis, khususnya dalam pemberitaan politik yang sarat dengan kepentingan dan relasi kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, independensi pers tidak hanya menghadapi tekanan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi media serta dinamika etika jurnalistik. Artikel ini bertujuan untuk menafsirkan ulang konsep independensi pers dalam kerangka etika media melalui kajian literatur terhadap praktik pemberitaan politik, dengan Tempo sebagai representasi jurnalisme kritis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan menganalisis berbagai sumber akademik, regulasi pers, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu independensi pers, etika media, dan jurnalisme politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa independensi pers tidak dapat dipahami sebagai kondisi absolut yang

sepenuhnya bebas dari pengaruh, melainkan sebagai praktik etis yang bersifat dinamis dan kontekstual. Tempo menunjukkan bentuk independensi etis melalui keberanian mengambil sikap kritis yang berpijak pada fakta dan kepentingan publik, meskipun berada di bawah tekanan struktur ekonomi dan politik industri media. Dengan demikian, independensi pers dalam pemberitaan politik lebih tepat dipahami sebagai hasil dari proses negosiasi berkelanjutan antara prinsip normatif jurnalisme, etika media, dan realitas struktural industri pers. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik mengenai etika media dan independensi pers di Indonesia.

Kata kunci: *Press Independence*, Media Ethics, Political Reporting, Critical Journalism, Tempo

Pendahuluan

Independensi pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi karena menjamin media massa dapat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan, menyampaikan informasi yang akurat kepada publik, serta bertindak bebas dari dominasi politik dan tekanan komersial. Di Indonesia, jaminan kebebasan pers diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengamanatkan pers sebagai lembaga sosial yang independen dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, terutama pada pemberitaan politik, independensi pers sering menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk tekanan politik, tuntutan ekonomi, serta dinamika etika media itu sendiri (Haqqullah & Safira, 2025).

Pers atau media massa yang ideal menjadi dambaan masyarakat di negara demokratis seperti Indonesia. Dambaan yang dimaksud yaitu media sungguh-sungguh menyuarakan aspirasi publik, menghormati hak asasi, menghargai keberagaman, mengedepankan rasionalitas, menginformasikan suatu kebenaran, menebarkan nilai-nilai kebaikan, mengedukasi, serta menyuguhkan konten hiburan. Media dikenal dan dibutuhkan publik karena menyuarakan informasi yang benar dengan prinsip independen. Prinsip independen media terbangun lewat kerja jurnalis yang profesional. Wartawan memiliki kebebasan dalam bekerja, tidak terikat, merdeka, dan mandiri (KBBI Daring). Sehingga independen di sini dapat diartikan media massa dan jurnalisnya bebas dari bentuk campur tangan apapun dari siapapun. Harapan khalayak yang begitu besar terhadap media di atas muncul karena mempersepsi surat kabar, televisi, dan radio sebagai sarana komunikasi yang dapat dipercaya dan memiliki berbagai kelebihan

dibanding medium lain. Realitasnya media dalam konteks ekonomi politik komunikasi tidak dapat dipisahkan dari bisnis.

Media massa di Indonesia seperti televisi, radio, portal berita, surat kabar, majalah, tabloid, dan media baru dalam berbagai platform adalah agen. Sedangkan regulasi seperti Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang tentang Pers, Undang Undang tentang Penyiaran serta sejumlah pedoman atau aturan yang dikeluarkan Dewan Pers adalah bagian dari struktur. Keduanya, agen dan struktur, merupakan dualitas yang saling berkaitan. Hubungan timbal balik ini menjadikan struktur tidak pernah ada tanpa agen, begitu pula agen tidak dapat berperan tanpa struktur (Santoso, 2021).

Media Tempo dikenal memiliki tradisi jurnalistik kritis dan investigatif dalam pemberitaan politik. Media ini sudah beberapa kali menjadi pusat kontroversi terkait kedalaman laporan, keberpihakan editorial, dan respons terhadap tekanan eksternal. Kasus intimidasi terhadap jurnalis Tempo dan upaya pelaporan konten tertentu ke Dewan Pers baru baru ini menunjukkan bahwa independensi pers tetap menjadi isu penting yang perlu ditelaah dari perspektif etika media dan demokrasi komunikasi.

Kasus jurnalis Tempo menjadi contoh nyata ujian independensi pers. Media ini dikenal kritis dan investigatif, sehingga beberapa liputannya memicu kontroversi dan menghadapi tekanan dari pihak eksternal. Analisis kasus ini penting untuk memahami praktik independensi pers dalam konteks nyata. (Haqqullah & Safira, 2025). Etika media memainkan peran sentral dalam menjaga independensi pers. Media yang beroperasi tanpa pedoman etika rentan terhadap penyimpangan, seperti bias editorial atau manipulasi informasi, yang dapat merusak kepercayaan publik. Independensi pers tidak hanya berarti bebas dari tekanan politik, tetapi juga bebas dari pengaruh ekonomi dan kepentingan pemilik media. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi media terhadap iklan atau sponsor dapat mengurangi kualitas independensi editorial.

Di era digital, independensi pers semakin diuji oleh algoritma platform online yang mendorong media untuk menghasilkan konten viral demi klik dan engagement. Fenomena ini menimbulkan dilema antara menjaga etika jurnalistik dan memenuhi tuntutan ekonomi digital. Dalam konteks pemberitaan politik, indenpedensi pers menjadi

sangat krusial karena media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik. Pemberitaan yang bias atau terpengaruh kepentingan politik dapat mengaburkan fakta dan mengurangi kualitas demokrasi. Tempo sebagai media nasional yang kritis menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan independensi dalam pemberitaan politik. Liputannya sering menjadi tolak ukur sejauh mana independensi pers dapat dijaga di Indonesia.

Penelitian tentang etika media dan independensi pers di Indonesia menunjukkan bahwa media yang berkomitmen pada etika jurnalistik mampu menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik meskipun menghadapi tekanan politik dan ekonomi (Harahap & Adeni, 2025). Studi literatur tentang pemberitaan politik Tempo memperlihatkan bahwa media ini tetap mempertahankan prinsip independensi meskipun berada di tengah tekanan politik dan sosial. Liputannya menjadi contoh praktik jurnalistik kritis yang beretika.

Kajian literatur ini bertujuan menafsir ulang independensi pers dalam konteks etika media dan pemberitaan politik. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana prinsip independensi dipraktikkan dan diuji di Indonesia. Dengan memfokuskan studi pada Tempo, penelitian ini dapat menilai implementasi prinsip independensi pers dalam praktik nyata, termasuk tantangan yang dihadapi jurnalis dan cara mereka menjaga etika jurnalistik di tengah tekanan eksternal.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menunjukkan urgensi menafsir ulang independensi pers sebagai kombinasi antara kebebasan editorial, tanggung jawab etika, dan kualitas jurnalistik. Studi literatur ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pemahaman independensi pers di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Independensi Pers dalam Kerangka Etika Jurnalisme

Independensi pers diposisikan dalam literatur sebagai prinsip normatif yang menjadi dasar legitimasi praktik jurnalistik profesional. McQuail (2010) memandang independensi sebagai prasyarat agar media dapat menjalankan fungsi sosialnya, khususnya sebagai pengawas kekuasaan dalam sistem demokrasi. Tanpa independensi,

pers berisiko kehilangan kapasitas kritisnya dan tereduksi menjadi instrumen kepentingan politik atau ekonomi tertentu.

Kovach dan Rosenstiel (2007) menegaskan bahwa loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga negara. Dalam kerangka ini, independensi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ketidakterlibatan media dalam konflik kepentingan, melainkan sebagai kebebasan redaksional untuk memproduksi informasi yang relevan, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, independensi pers lebih tepat dimaknai sebagai nilai etis yang membimbing keputusan jurnalistik, bukan sebagai sikap netral yang steril dari penilaian.

Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa independensi pers tidak pernah sepenuhnya terlepas dari konteks struktural tempat media beroperasi. Relasi media dengan kekuatan politik, kepentingan ekonomi, serta struktur kepemilikan berpotensi memengaruhi proses produksi berita (McChesney, 2004). Kondisi ini menunjukkan bahwa independensi pers merupakan praktik yang bersifat dinamis dan terus dinegosiasikan, bukan kondisi ideal yang bersifat absolut.

Etika Media dan Kode Etik Jurnalistik

Etika media merujuk pada seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana media seharusnya menjalankan perannya dalam masyarakat. Christians et al. (2009) menempatkan etika jurnalisme dalam kerangka tanggung jawab sosial media, yakni kewajiban untuk menyajikan informasi yang akurat, adil, dan memiliki nilai publik. Dalam konteks ini, kebebasan pers selalu diiringi oleh tuntutan tanggung jawab etis terhadap masyarakat.

Di Indonesia, prinsip etika jurnalistik dilembagakan melalui Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Pasal 1 KEJ menegaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat dan berimbang. Sementara itu, Pasal 3 menekankan kewajiban uji informasi dan pemisahan antara fakta dan opini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa independensi pers merupakan prinsip etis yang tidak terpisahkan dari akurasi dan integritas jurnalistik.

Ward (2010) menekankan bahwa etika media tidak bersifat statis, melainkan perlu ditafsirkan ulang sesuai dengan perubahan konteks sosial dan politik. Dalam situasi politik yang semakin terpolarisasi, media kerap dihadapkan pada dilema antara menjaga jarak dari kekuasaan dan tetap menjalankan fungsi kritisnya. Oleh karena itu, kajian etika media perlu bergerak melampaui pendekatan normatif menuju analisis reflektif terhadap praktik jurnalistik aktual.

Pemberitaan Politik dan Tantangan Independensi Pers

Pemberitaan politik merupakan arena jurnalistik yang paling rentan terhadap tekanan kepentingan. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi politik, tetapi juga sebagai aktor yang turut membentuk wacana dan makna atas realitas politik (Hall et al., 1980). Dalam konteks ini, independensi pers sering kali diuji melalui proses seleksi isu, pemilihan narasumber, serta cara media membingkai peristiwa politik.

Entman (1993) menjelaskan bahwa framing media berperan dalam menonjolkan aspek tertentu dari realitas sekaligus mengaburkan aspek lainnya. Praktik framing ini tidak selalu mencerminkan keberpihakan politik secara eksplisit, tetapi dapat mengindikasikan kecenderungan ideologis yang memengaruhi independensi pemberitaan. Oleh karena itu, independensi pers dalam pemberitaan politik tidak cukup dinilai dari keseimbangan formal semata, melainkan juga dari cara media mengonstruksi narasi dan makna politik.

Konsep *mediatization of politics* yang dikemukakan oleh Strömbäck (2005) menunjukkan bahwa relasi antara media dan politik bersifat timbal balik. Media tidak sepenuhnya berada di luar kekuasaan politik, melainkan menjadi bagian dari dinamika tersebut. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa independensi pers perlu dipahami sebagai praktik etis yang berada dalam ketegangan antara ideal profesional dan realitas politik.

Netralitas, Objektivitas, dan Independensi Etis

Dalam diskursus etika jurnanisme, independensi pers kerap disandingkan dengan objektivitas dan netralitas. Objektivitas sering dipahami sebagai upaya menyajikan fakta secara bebas nilai, namun pendekatan ini menuai kritik karena mengabaikan kenyataan

bahwa praktik jurnalistik selalu berlangsung dalam konteks sosial dan politik tertentu (Schudson, 2001). Dalam situasi ketimpangan kekuasaan, tuntutan netralitas prosedural justru berpotensi menempatkan semua aktor politik pada posisi yang seolah setara secara moral dan faktual.

Sejumlah pemikir etika media membedakan antara netralitas prosedural dan independensi etis. Independensi etis tidak menuntut media untuk bersikap pasif atau abstain dari penilaian moral, melainkan menuntut kebebasan redaksi untuk melakukan penilaian kritis berbasis fakta dan kepentingan publik (Ward, 2010). Dengan demikian, keberpihakan jurnalistik terhadap nilai demokrasi dan akuntabilitas tidak serta-merta dapat dipandang sebagai pelanggaran independensi, melainkan sebagai bagian dari praktik etika media yang bertanggung jawab.

Struktur Ekonomi Media dan Batas Material Independensi

Selain dimensi normatif, independensi pers juga dipengaruhi oleh kondisi material dan struktur ekonomi media. Perspektif ekonomi politik media menyoroti bagaimana kepemilikan, model bisnis, serta relasi media dengan kekuatan ekonomi dan politik memengaruhi proses produksi berita (Mosco, 2009). Herman dan Chomsky (1988) melalui propaganda model menunjukkan bahwa media beroperasi melalui berbagai mekanisme struktural yang berpotensi membatasi ruang independensi redaksional.

Dalam konteks ini, independensi pers perlu dipahami sebagai praktik etis yang berada dalam ketegangan antara ideal profesional dan tuntutan struktural. Media dengan reputasi jurnalisme kritis sekalipun tetap beroperasi dalam ekosistem yang menuntut keberlanjutan ekonomi dan negosiasi kepentingan. Oleh karena itu, klaim independensi pers tidak dapat diterima begitu saja secara normatif, melainkan perlu dikaji secara kritis melalui praktik pemberitaan aktual.

Tempo dan Tradisi Jurnalisme Kritis

Tempo kerap dipersepsikan sebagai media yang memiliki tradisi jurnalisme kritis dan investigatif dalam sejarah pers Indonesia. Pengalaman pembredelan pada masa Orde Baru sering dijadikan rujukan normatif untuk memahami posisi Tempo sebagai simbol

perlawanan pers terhadap kekuasaan (Steele, 2005). Tradisi tersebut membentuk identitas jurnalistik Tempo dalam lanskap media pascareformasi.

Namun, dalam konteks media kontemporer, praktik independensi Tempo tidak terlepas dari dinamika struktural dan ideologis yang memengaruhi industri pers. Hanitzsch (2007) menekankan bahwa kultur jurnalisme dipengaruhi oleh nilai profesional, tekanan organisasi, dan konteks sosial-politik. Dengan demikian, independensi Tempo dalam pemberitaan politik perlu dipahami sebagai praktik yang bersifat kontekstual dan dinamis, bukan sebagai karakter inherent yang bersifat statis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep independensi pers dalam kerangka etika media secara mendalam dan kontekstual, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis secara kritis konsep independensi pers serta penerapannya dalam pemberitaan politik. Analisis difokuskan pada penafsiran teoritis dan refleksi normatif terhadap praktik jurnalistik, khususnya yang dilakukan oleh media Tempo sebagai studi rujukan konseptual.

Data penelitian ini bersumber dari literatur akademik, berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas independensi pers, etika media, ekonomi politik media, dan pemberitaan politik (McQuail, Kovach & Rosenstiel, Ward, Herman & Chomsky, Hanitzsch, dan lainnya). Dengan menggunakan dokumen regulatif, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan praktik independensi pers dan pemberitaan politik Tempo di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur secara sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Literatur dipilih

berdasarkan relevansi teoritis, kredibilitas akademik, serta kontribusinya terhadap pemahaman independensi pers dan etika jurnalistik.

Pembahasan

Independensi Pers antara Prinsip Normatif dan Realitas Praktik

Dalam kajian jurnanisme dan etika media, independensi pers secara konsisten diposisikan sebagai prinsip normatif yang mendasari legitimasi sosial dan profesional media massa. Independensi dipandang sebagai prasyarat agar pers dapat menjalankan fungsi informatif, edukatif, serta fungsi pengawasan (watchdog) terhadap kekuasaan politik dan institusi publik (McQuail, 2010). Tanpa independensi, media berisiko kehilangan otonomi editorialnya dan tereduksi menjadi alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu.

Secara normatif, independensi pers sering didefinisikan sebagai kebebasan media dari campur tangan pihak luar, baik negara, aktor politik, maupun pemilik modal. Kovach dan Rosenstiel (2007) menegaskan bahwa loyalitas utama jurnanisme adalah kepada warga negara, bukan kepada kekuasaan. Dalam kerangka ini, independensi tidak semata-mata berarti kebebasan formal, tetapi juga mencakup komitmen etis untuk memproduksi informasi yang akurat, relevan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Namun demikian, literatur kritis menunjukkan bahwa independensi pers dalam praktik tidak pernah sepenuhnya terwujud sebagai kondisi ideal. Media selalu beroperasi dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang membentuk batas-batas praktik jurnalistik (McChesney, 2004). Struktur kepemilikan media, ketergantungan pada iklan, serta relasi dengan aktor politik berpengaruh terhadap proses seleksi isu, penentuan sudut pandang, dan framing pemberitaan. Dengan demikian, independensi pers lebih tepat dipahami sebagai praktik yang bersifat relasional dan kontekstual, bukan sebagai kondisi absolut.

Ketegangan antara prinsip normatif dan realitas praktik ini menjadi semakin nyata dalam konteks pemberitaan politik. Politik merupakan arena yang sarat kepentingan, konflik ideologis, serta relasi kuasa yang tidak seimbang. Media dihadapkan pada dilema

antara menjaga jarak dari aktor politik dan menjalankan fungsi kritis terhadap kebijakan serta praktik kekuasaan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam situasi ini, independensi pers tidak dapat direduksi menjadi sekadar “tidak memihak”, melainkan perlu dilihat sebagai kemampuan media untuk mempertahankan otonomi editorial di tengah tekanan struktural yang kompleks.

Perspektif ekonomi politik media memberikan kerangka penting untuk memahami keterbatasan independensi pers dalam praktik. Herman dan Chomsky (1988) melalui propaganda model menunjukkan bahwa media bekerja dalam sistem struktural yang menciptakan berbagai “filter” terhadap produksi berita, mulai dari kepemilikan media hingga kepentingan pengiklan dan sumber informasi dominan. Meskipun model ini dikembangkan dalam konteks media Barat, gagasannya relevan untuk membaca realitas media di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana konsentrasi kepemilikan media dan relasi dengan kekuasaan politik masih menjadi persoalan penting.

Dalam konteks tersebut, independensi pers tidak dapat dipahami sebagai kondisi bebas dari pengaruh, melainkan sebagai proses negosiasi yang terus berlangsung. Media dan jurnalis dituntut untuk mengambil keputusan editorial dalam situasi yang sering kali tidak ideal. Keputusan tersebut melibatkan pertimbangan etis, profesional, serta kalkulasi risiko politik dan ekonomi. Oleh karena itu, praktik independensi pers lebih tepat dipahami sebagai spektrum, di mana media berupaya menjaga otonomi editorial sejauh memungkinkan dalam batas-batas struktural yang ada.

Pemahaman ini penting untuk menghindari pendekatan normatif yang menyederhanakan persoalan independensi pers menjadi dikotomi independen versus tidak independen. Pendekatan semacam itu berisiko mengabaikan kompleksitas praktik jurnalistik dan tantangan nyata yang dihadapi media. Sebaliknya, dengan memahami independensi sebagai praktik yang dinamis, kajian etika media dapat memberikan analisis yang lebih realistis dan reflektif terhadap bagaimana nilai-nilai jurnalistik dijalankan dalam konteks sosial-politik tertentu.

Dengan demikian, pembacaan terhadap independensi pers perlu mempertimbangkan relasi antara prinsip normatif yang diidealkan dalam teori jurnalisme

dan realitas praktik yang dibentuk oleh struktur ekonomi-politik media. Pendekatan ini membuka ruang untuk menilai independensi pers bukan sebagai klaim moral semata, tetapi sebagai praktik etis yang terus diuji dan dinegosiasikan dalam kehidupan jurnalistik sehari-hari.

Etika Media sebagai Kerangka Penjaga Independensi Pers

Dalam praktik jurnalistik, independensi pers tidak dapat berdiri sendiri sebagai prinsip yang bekerja secara otomatis. Independensi justru membutuhkan kerangka normatif yang membimbing bagaimana kebebasan editorial dijalankan secara bertanggung jawab. Dalam konteks inilah etika media berperan sebagai penyangga utama independensi pers. Etika media menyediakan seperangkat nilai moral dan prinsip profesional yang berfungsi membatasi sekaligus mengarahkan kebebasan pers agar tidak menyimpang dari kepentingan publik.

Christians et al. (2009) menempatkan etika media dalam kerangka tanggung jawab sosial, di mana kebebasan pers harus selalu diimbangi dengan kewajiban moral terhadap masyarakat. Dalam perspektif ini, independensi pers bukan hanya soal bebas dari tekanan eksternal, tetapi juga soal kemampuan internal media untuk mengendalikan diri melalui prinsip etis. Tanpa etika media, independensi berpotensi berubah menjadi kebebasan tanpa arah, yang justru dapat merusak kredibilitas jurnalisme itu sendiri.

Di Indonesia, etika media dilembagakan melalui Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Penegasan mengenai independensi, akurasi, dan keberimbangan dalam KEJ menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak dipahami sebagai kebebasan absolut, melainkan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam praktik pemberitaan politik, keberadaan kode etik ini berfungsi sebagai rujukan normatif bagi jurnalis ketika menghadapi tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan pemilik media.

Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa penerapan etika media dalam praktik jurnalistik tidak selalu berlangsung secara ideal. Ward (2010) menegaskan bahwa etika jurnalisme bersifat kontekstual dan reflektif, sehingga tidak dapat diterapkan secara mekanis dalam setiap situasi. Dalam konteks politik yang sarat konflik

kepentingan, jurnalis kerap dihadapkan pada dilema etis antara menjaga jarak dari aktor politik dan memenuhi tuntutan publik akan informasi yang kritis dan bermakna.

Situasi ini memperlihatkan bahwa etika media tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai ruang refleksi profesional. Jurnalis dituntut untuk menafsirkan prinsip etika secara situasional tanpa menghilangkan orientasi utamanya pada kepentingan publik. Dengan kata lain, etika media menjadi mekanisme internal yang memungkinkan independensi pers tetap terjaga meskipun berada dalam tekanan struktural yang kuat.

Dalam konteks pemberitaan politik, peran etika media sebagai penyangga independensi menjadi semakin penting. Politik merupakan ranah yang tidak netral dan penuh relasi kuasa. Pemberitaan yang sepenuhnya menghindari penilaian kritis atas nama netralitas justru berisiko mengaburkan fakta dan dampak kebijakan publik. Oleh karena itu, independensi pers yang ditopang oleh etika media memungkinkan media untuk tetap bersikap kritis tanpa terjebak pada keberpihakan politik yang sempit.

Dengan demikian, etika media dapat dipahami sebagai fondasi moral yang menjaga agar independensi pers tidak kehilangan orientasi normatifnya. Independensi yang tidak ditopang oleh etika berpotensi berubah menjadi bias tersembunyi atau kepentingan terselubung, sementara etika media tanpa independensi berisiko kehilangan daya kritis terhadap kekuasaan. Relasi keduanya bersifat saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik jurnalistik yang profesional.

Dalam kerangka ini, etika media bukan sekadar pelengkap independensi pers, melainkan mekanisme penopang yang memungkinkan kebebasan pers dijalankan secara reflektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemahaman ini menjadi penting untuk membaca praktik pemberitaan politik media, termasuk Tempo, yang kerap berada dalam posisi dilematis antara menjaga jarak dari kekuasaan dan menjalankan fungsi kritik sosial.

Netralitas, Objektivitas, dan Independensi Etis dalam Pemberitaan Politik

Dalam diskursus jurnalisme modern, netralitas dan objektivitas sering diposisikan sebagai indikator utama independensi pers. Secara normatif, jurnalis dituntut untuk

menjaga jarak dari preferensi pribadi, kepentingan politik, maupun tekanan ideologis agar mampu menyajikan informasi secara adil dan berimbang. Objektivitas dipahami sebagai prosedur profesional yang menekankan verifikasi fakta, keberimbangan sumber, serta pemisahan antara fakta dan opini (McQuail, 2010).

Namun, berbagai kajian kritis menunjukkan bahwa netralitas dan objektivitas bukanlah konsep yang bebas nilai. Schudson (2001) menegaskan bahwa objektivitas merupakan konstruksi historis yang lahir dari kebutuhan profesional jurnalisme modern untuk membangun legitimasi publik. Dengan demikian, objektivitas tidak dapat dipahami sebagai refleksi realitas secara murni, melainkan sebagai seperangkat praktik dan konvensi profesional yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik.

Dalam konteks pemberitaan politik, keterbatasan netralitas dan objektivitas menjadi semakin terlihat. Politik merupakan arena yang sarat relasi kuasa dan kepentingan yang tidak seimbang. Ketika media menerapkan netralitas secara prosedural, misalnya dengan memberikan porsi yang sama kepada semua aktor politik tanpa mempertimbangkan ketimpangan kekuasaan atau dampak kebijakan terhadap publik, pemberitaan yang dihasilkan berisiko kehilangan dimensi kritisnya. Dalam situasi ini, netralitas justru dapat berfungsi sebagai mekanisme depolitisasi yang menyamarkan relasi dominasi.

Kritik terhadap netralitas prosedural mendorong munculnya gagasan tentang independensi etis. Ward (2010) mengemukakan bahwa jurnalisme etis tidak cukup hanya berpegang pada prinsip keseimbangan formal, tetapi harus berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kepentingan publik. Independensi etis memungkinkan jurnalis untuk melakukan penilaian normatif berbasis fakta, tanpa harus terjebak pada klaim keberpihakan politik yang sempit.

Dalam kerangka ini, independensi tidak lagi dipahami sebagai sikap “tidak berpihak” secara pasif, melainkan sebagai kemampuan untuk menjaga otonomi editorial sambil menjalankan fungsi kritik sosial secara aktif. Media dapat mengambil posisi kritis terhadap kebijakan atau praktik kekuasaan tertentu selama posisi tersebut didasarkan pada verifikasi fakta, analisis rasional, dan orientasi pada kepentingan publik. Pendekatan ini

menempatkan etika media sebagai fondasi yang melegitimasi sikap kritis media dalam pemberitaan politik.

Lebih jauh, perspektif ini juga menantang dikotomi sederhana antara jurnalisme objektif dan jurnalisme partisan. Dalam banyak kasus, pemberitaan yang terlalu berpegang pada netralitas formal justru gagal mengungkap persoalan struktural yang mendasari konflik politik. Sebaliknya, independensi etis membuka ruang bagi media untuk mengungkap ketimpangan kekuasaan, konflik kepentingan, serta implikasi kebijakan publik secara lebih mendalam tanpa harus kehilangan kredibilitas profesionalnya.

Dalam konteks media demokratis, independensi etis dapat dipandang sebagai bentuk evolusi dari konsep objektivitas klasik. Objektivitas tidak ditinggalkan sepenuhnya, tetapi didefinisikan sebagai komitmen terhadap kebenaran faktual dan kepentingan publik, bukan sekadar keseimbangan formal antaraktor. Dengan demikian, independensi etis memungkinkan media menjalankan perannya sebagai aktor sosial yang bertanggung jawab, bukan sekadar penyalur informasi yang netral secara prosedural.

Pemahaman ini menjadi penting dalam membaca praktik pemberitaan politik media yang memiliki tradisi jurnalisme kritis. Ketika media mengambil sikap editorial yang tegas terhadap isu-isu tertentu, sikap tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pelanggaran independensi. Sebaliknya, sikap tersebut dapat dibaca sebagai wujud independensi etis yang dijalankan dalam kerangka etika media dan tanggung jawab sosial pers.

Struktur Ekonomi Media dan Dinamika Independensi Editorial

Independensi editorial media tidak hanya ditentukan oleh komitmen normatif dan etika profesional jurnalis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi tempat media tersebut beroperasi. Media massa sebagai institusi sosial sekaligus entitas ekonomi harus berhadapan dengan tuntutan keberlanjutan finansial, yang sering kali menciptakan ketegangan antara idealisme jurnalistik dan kepentingan ekonomi. Dalam konteks ini, struktur kepemilikan media, pola pendanaan, serta relasi dengan pengiklan dan pasar menjadi faktor penting yang membentuk praktik independensi editorial.

Perspektif ekonomi politik media memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana kekuatan ekonomi memengaruhi produksi dan distribusi berita. Mosco (2009) menegaskan bahwa media tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang terbangun melalui kepemilikan, komodifikasi konten, dan kontrol terhadap proses komunikasi. Kepemilikan media yang terkonsentrasi pada segelintir aktor ekonomi atau politik berpotensi membatasi ruang otonomi redaksi, terutama dalam pemberitaan isu-isu politik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan pemilik media.

Ketergantungan media pada pendapatan iklan juga menjadi faktor struktural yang memengaruhi independensi editorial. Dalam sistem media komersial, iklan merupakan sumber pendanaan utama yang memungkinkan media bertahan secara ekonomi. Namun, ketergantungan ini sering kali menciptakan tekanan tidak langsung terhadap isi pemberitaan. Media cenderung menghindari liputan yang berpotensi merugikan kepentingan pengiklan besar atau kelompok ekonomi dominan. Meskipun tekanan tersebut tidak selalu bersifat eksplisit, keberadaannya cukup untuk membentuk pola seleksi isu dan framing berita.

Herman dan Chomsky (1988) melalui propaganda model menunjukkan bahwa struktur ekonomi media bekerja sebagai sistem filter yang memengaruhi alur informasi dari produksi hingga distribusi. Filter kepemilikan, iklan, dan sumber informasi dominan secara kumulatif membatasi spektrum wacana yang dapat muncul di media arus utama. Dalam konteks ini, independensi editorial tidak hilang sepenuhnya, tetapi bergerak dalam batas-batas struktural yang telah ditentukan oleh sistem ekonomi media itu sendiri.

Dinamika ini menjadi semakin kompleks dalam konteks pemberitaan politik. Isu-isu politik sering kali melibatkan aktor yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh politik yang signifikan. Media yang berada dalam struktur kepemilikan tertentu harus menegosiasikan posisi editorialnya ketika meliput kebijakan atau konflik politik yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik media atau jaringan ekonominya. Situasi ini menunjukkan bahwa independensi editorial tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang bersifat struktural.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi tidak sepenuhnya menentukan praktik jurnalistik secara deterministik. Hanitzsch (2007) menekankan bahwa kultur jurnalisme dibentuk oleh interaksi antara nilai profesional, tekanan organisasi, dan konteks sosial-politik. Dalam kerangka ini, ruang bagi otonomi editorial tetap terbuka melalui mekanisme internal redaksi, profesionalisme jurnalis, serta komitmen etis institusi media. Artinya, meskipun struktur ekonomi membatasi, ia tidak sepenuhnya meniadakan kemungkinan praktik independensi editorial.

Pemahaman ini penting untuk menghindari pandangan deterministik yang melihat media semata-mata sebagai alat kepentingan ekonomi. Sebaliknya, independensi editorial perlu dipahami sebagai hasil dari negosiasi terus-menerus antara struktur ekonomi dan agensi profesional jurnalis. Media dapat mempertahankan derajat independensi tertentu melalui kebijakan redaksional, tradisi jurnalisme kritis, serta legitimasi profesional yang dibangun dalam jangka panjang.

Dengan demikian, struktur ekonomi media tidak menghapus independensi editorial, tetapi membentuk dinamika dan batas-batasnya. Independensi pers dalam konteks ini merupakan praktik yang bersifat situasional dan berjenjang, di mana media berupaya menjaga otonomi editorial sejauh memungkinkan dalam sistem ekonomi-politik yang membingkainya. Perspektif ini memberikan dasar analitis yang kuat untuk membaca praktik independensi media dalam pemberitaan politik, termasuk dalam kasus Tempo, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Tempo dan Artikulasi Independensi dalam Pemberitaan Politik

Tempo menempati posisi yang khas dalam sejarah dan lanskap pers Indonesia. Sejak awal kemunculannya, Tempo dikenal sebagai media yang mengedepankan jurnalisme investigatif dan sikap kritis terhadap kekuasaan. Pengalaman pembredelan pada masa Orde Baru sering dipahami sebagai simbol komitmen Tempo terhadap kebebasan dan independensi pers. Warisan historis ini membentuk identitas editorial Tempo dan menjadi rujukan normatif dalam praktik jurnalistiknya hingga periode pascareformasi.

Dalam konteks pemberitaan politik, Tempo kerap dipersepsikan sebagai media yang “tidak netral” karena keberaniannya mengkritik kebijakan pemerintah atau aktor politik tertentu. Namun, jika dibaca melalui perspektif etika media dan independensi etis, sikap tersebut tidak dapat serta-merta dipahami sebagai pelanggaran independensi pers. Sebaliknya, sikap kritis Tempo justru dapat dilihat sebagai artikulasi independensi etis yang berorientasi pada kepentingan publik dan nilai-nilai demokrasi.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, independensi etis tidak menuntut media untuk bersikap netral secara pasif, melainkan mendorong media untuk menjaga otonomi editorial sambil menjalankan fungsi kritik sosial secara aktif. Dalam kerangka ini, pemberitaan politik Tempo dapat dibaca sebagai praktik jurnalistik yang berupaya melampaui netralitas prosedural. Tempo tidak sekadar menyajikan pernyataan dari berbagai aktor politik secara seimbang, tetapi juga mengontekstualisasikan pernyataan tersebut dalam kerangka analisis yang lebih luas, termasuk implikasi kebijakan, relasi kuasa, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pendekatan editorial semacam ini menunjukkan bahwa Tempo mengoperasikan independensi sebagai kemampuan untuk melakukan penilaian normatif berbasis fakta. Kritik terhadap kebijakan atau aktor politik tertentu tidak diarahkan pada keberpihakan partisan, melainkan pada upaya menjaga akuntabilitas publik. Dalam perspektif etika media, keberpihakan pada kepentingan publik merupakan bagian dari tanggung jawab sosial pers, bukan penyimpangan dari prinsip independensi.

Namun demikian, praktik independensi etis Tempo juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika struktur ekonomi dan politik media. Sebagai institusi media yang beroperasi dalam sistem ekonomi kapitalistik, Tempo tetap menghadapi tuntutan keberlanjutan finansial, relasi dengan pasar, serta tekanan politik yang bersifat struktural. Dalam konteks ini, independensi Tempo bukanlah kondisi yang sepenuhnya bebas dari kompromi, melainkan hasil dari negosiasi yang terus berlangsung antara idealisme jurnalistik dan realitas struktural.

Keberlanjutan reputasi Tempo sebagai media kritis dapat dipahami sebagai modal simbolik yang memperkuat posisi editorialnya. Modal ini memungkinkan Tempo untuk

mempertahankan ruang otonomi redaksi yang relatif lebih luas dibandingkan media lain. Dengan kata lain, independensi etis Tempo tidak hanya dibangun melalui komitmen normatif, tetapi juga melalui legitimasi profesional yang diakumulasi secara historis.

Pemberitaan politik Tempo juga mencerminkan penerapan etika media yang bersifat reflektif. Dalam menghadapi isu-isu politik yang kontroversial, Tempo tidak sepenuhnya menghindari risiko kritik atau tuduhan keberpihakan. Sebaliknya, media ini tampak menempatkan tanggung jawab terhadap kepentingan publik di atas tuntutan netralitas formal. Sikap ini sejalan dengan pandangan bahwa etika jurnalistik bukanlah seperangkat aturan kaku, melainkan kerangka reflektif yang memungkinkan jurnalis mengambil keputusan profesional dalam situasi yang kompleks.

Dengan demikian, Tempo dapat dipahami sebagai contoh praktik independensi pers yang bersifat etis dan kontekstual. Independensi tidak diwujudkan melalui jarak emosional yang steril terhadap politik, melainkan melalui keberanian untuk mengajukan kritik berbasis fakta dan analisis yang mendalam. Perspektif ini menegaskan bahwa independensi pers dalam pemberitaan politik tidak dapat diukur semata-mata dari absennya sikap kritis, tetapi dari konsistensi media dalam mempertanggungjawabkan sikap editorialnya secara etis dan profesional.

Pembacaan terhadap Tempo dalam kerangka independensi etis memberikan kontribusi konseptual bagi kajian etika media di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih nuansa terhadap praktik jurnalistik media politik, sekaligus menghindari penilaian normatif yang menyederhanakan kompleksitas relasi antara media, kekuasaan, dan kepentingan publik.

Simpulan

Berdasarkan kajian literatur dan analisis praktik jurnalistik Tempo, dapat disimpulkan bahwa independensi pers di Indonesia merupakan prinsip normatif yang fundamental, namun dalam praktiknya selalu berada dalam ketegangan antara ideal profesional dan realitas struktural. Independensi pers tidak sekadar kebebasan formal dari campur tangan politik atau ekonomi, tetapi juga mencakup komitmen etis untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Media yang berpegang pada prinsip ini mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai pengawas kekuasaan dan agen edukasi bagi masyarakat.

Lebih jauh, etika media berperan sebagai penopang utama independensi pers. Kode Etik Jurnalistik dan prinsip tanggung jawab sosial memberikan panduan bagi jurnalis dalam menghadapi dilema editorial, termasuk tekanan politik, tuntutan ekonomi, dan kepentingan pemilik media. Pendekatan independensi etis, seperti yang diterapkan Tempo, menunjukkan bahwa sikap kritis dan keberpihakan terhadap kepentingan publik bukanlah pelanggaran, melainkan bagian dari praktik jurnalistik yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, etika media memungkinkan media untuk menjaga otonomi editorial sambil tetap menjalankan fungsi kritik sosial.

Akhirnya, studi terhadap Tempo menegaskan bahwa independensi pers bersifat kontekstual, dinamis, dan dipengaruhi oleh struktur ekonomi-politik media. Media dapat mempertahankan otonomi editorial melalui komitmen profesional, modal simbolik yang diperoleh dari reputasi kritis, dan penerapan etika jurnalistik yang reflektif. Praktik independensi pers seperti ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi dan akuntabilitas publik sangat bergantung pada kemampuan media untuk menavigasi tekanan eksternal tanpa mengorbankan integritas jurnalistiknya.

Daftar Pustaka

- Christians, C. G., Glasser, T. L., McQuail, D., Nordenstreng, K., & White, R. A. (2009). *Normative theories of the media: Journalism in democratic societies*. University of Illinois Press.
- Dewan Pers. (2018). *Kode etik jurnalistik*. Dewan Pers Republik Indonesia.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Haqqullah, W. M., & Safira, U (2025). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Independensi Kebebasan Pers Pada Kasus Jurnalis Tempo. *Journal of Constitutional Law and Governance*. 5(1), 17-37.
- Harahap, A. M., & Adeni, S (2025). Journalism Ethic In Online Media In Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. 8, 6522-6526.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. Pantheon Books.

- McChesney, R. W. (2004). *The problem of the media: U.S. communication politics in the twenty-first century*. Monthly Review Press.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Mosco, V. (2009). *The political economy of communication* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Musfialdy. (2019). Independensi media: Pro-kontra objektivitas dan netralitas pemberitaan media. *Jurnal Riset Komunikasi*, 2(1), 45–58.
- Santoso, E (2021). Independensi Media Tempo Dan Pengaruh Ekonomi Politik Dalam Praktik Strukturasi. *Jurnal Pustaka Komunikasi*. 6(1), 24-38.
- Schudson, M. (2001). The objectivity norm in American journalism. *Journalism*, 2(2), 149–170.
- Strömbäck, J. (2005). In search of a standard: Four models of democracy and their normative implications for journalism. *Journalism Studies*, 6(3), 331–345.
- Ward, S. J. A. (2010). *Global journalism ethics*. McGill-Queen's University Press.